

Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Pendidikan Multikultural

Mualimul Huda

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, Indonesia

 hudamahbubi@gmail.com

Abstract : The crisis that has penetrated Indonesia now is a multidimensional crisis, starting from a crisis of morality, ethics and tolerance. The decline in moral values in students has now become a challenge and warning for all parties, especially educational institutions, the role of teachers and parents. Many cases happen to young people, ranging from cases of intolerance, *bullying*, promiscuity and other deviant acts. Various multidimensional crises in Indonesia, whether recognized or not are part of the cultural problems one of the causes is the diversity of cultures that exist in our society. Cultural diversity should not be a cause of discrimination, injustice, suspicion and various human rights violations, but rather a force to build togetherness. The teacher has an important role in the transmission of science, information, character education, research, recreation, and cultural understanding. The thought of multicultural Islamic education in Indonesia is based on Islamic teachings as a source of thought. Multiculturality is a *sunnatullah* that can not be avoided in it contains important values for the development of faith and social life the role of the teacher plays an important role in rectifying the understanding of Islam that deviates from the understanding of Islam which is "*Rahmatan lil allamin*". This study includes the study of *library research* using an empirical-based qualitative approach. In this study the study of literature was used in collecting data. While the data analysis technique uses *content analysis* by sorting the data then grouping similar data and then analyzing the contents according to the purpose of the study. The result is that it takes the role and role model of the teacher about mutual respect by acting fairly, objectively, giving feedback and reflection in learning , use polite language and not touch sensitive issues related to religious and ethnic differences. The need to emphasize multicultural values in the curriculum of Islamic religious education, and integrate teaching models and methods so that learning objectives can be achieved. The development of multicultural Islamic education is felt to be able to become a means in building a more substantive, contextual, positive and constructive national civilization. It is hoped that teachers will be able to encourage students to have awareness and understanding to always uphold the values of justice, democracy, humanity and pluralism in relationships.

Keywords: Teacher, Multicultural Education, Islamic Religious Education

Abstrak : Krisis yang merambah Indonesia kini adalah krisis multidimensional, mulai dari krisis moral, etika dan toleransi. Kemunduran nilai-nilai moral pada peserta didik saat ini telah menjadi tantangan dan peringatan bagi semua pihak, terutama lembaga pendidikan, peran guru dan orang tua. Banyak kasus yang menimpa generasi muda, mulai dari kasus intoleransi, *bullying*, pergaulan bebas dan perbuatan menyimpang lainnya. Berbagai krisis

multidimensi yang ada di Indonesia, diakui atau tidak merupakan bagian dari problem kultural yang salah satu penyebabnya adalah keragaman kultur yang ada di masyarakat kita. Keragaman kultur seharusnya bukan menjadi penyebab adanya diskriminasi, ketidakadilan, kecurigaan dan berbagai pelanggaran HAM, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan. Gurumemiliki peran penting dalam transmisi ilmu pengetahuan, informasi, pendidikan karakter, penelitian, rekreasi, dan pemahaman kultural. Pemikiranpendidikan Islam multikultural yang ada di Indonesia disandarkan pada ajaran Islam sebagai sumber pemikiran.

Multikulturalitas merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari didalamnya mengandung nilai-nilai penting bagi pembangunan keimanan dan kehidupan sosial peran guru memegang peranan penting dalam meluruskan pemahaman Islam yang menyimpang kepada pemahaman Islam yang "*Rahmatan lil allamin*". Kajian ini termasuk kajian *library research* dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis empiris, Dalam penelitian ini digunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya. Sedangkan teknik analisa datanya menggunakan *content analysis* dengan memilah-milah data selanjutnya mengelompokkan data yang sejenis lalu menganalisisnya sesuai dengan tujuan studi.. Hasilnya bahwa dibutuhkan peran dan keteladanan dari gurutentang saling menghargai dengan bertindak adil, objektif, memberikan umpan balik dan refleksi dalam pembelajaran, penggunaan bahasa yang santun dan tidak menyinggungisu sensitif yang berkaitan dengan perbedaan agama dan suku. Perlunya penekanan nilai multikultural dalam kurikulum pendidikan agama Islam, serta memadukan model dan metode mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pengembangan pendidikan Islam multikultural tersebut dirasakan akan mampu menjadi sebuah sarana dalam membangun peradaban bangsa yang lebih substantif, kontekstual, positif dan konstruktif. Diharapkan guru mampu mendorong peserta didik untuk memiliki kesadaran dan pemahaman untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokrasi, kemanusiaan dan pluralisme dalam pergaulan.

Kata kunci: Guru, Pendidikan Multikultural, Pendidikan Agama Islam

Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan (*archipelago*),¹ Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dari sisi etnis, agama maupun budaya. Dari sisi etnisitas di Indonesia terdiri lebih dari 101 etnis dengan beragam bahasa yang mereka miliki. Etnis tersebut tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Dari sisi agama, keragaman agama yang ada di Indonesia bisa dilihat dari berbagai agama yang ada antara lain Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha, Konghuchu dan berbagai kepercayaan lokal lainnya. Keragaman tersebut satu sisi merupakan potensi yang sangat besar untuk kemajuan akan tetapi sisi lain rawan terhadap terjadinya konflik sosial yang bersifat komunal.

¹Yudi Latif, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.2.

Setelah reformasi 1998, keragaman kultur di Indonesia tersebut mulai mendapatkan ujian yang serius. Berbagai konflik kekerasan yang bersifat komunal, seperti konflik Sambas, Ambon dan Poso yang membahayakan kebersamaan masyarakat Indonesia. Konflik sosial yang berbau SARA ini tidak bisa dianggap remeh, sebab besarkemungkinan akan menyulut konflik di daerah lainnya. Oleh sebab itu, harus segera diatasi secara memadai dan proporsional agar tidak menciptakan disintergrasi nasional.² Paling tidak, ada empat faktor yang mendorong adanya budaya kekerasan di Indonesia, yaitu: *pertama*, kegagapan budaya. *Kedua*, akumulasi kebencian dalam masyarakat yang diawali dari *prejudice* yang salah terhadap pemeluk agama lain. *Ketiga*, masyarakat Indonesia telah terjebak dalam budaya intoleran, tidak menerima pluralitas tradisi, cara berkomunikasi, cara pandang terhadap kehidupan dan tekanan terhadap tradisi. *Keempat*, politik yang tidak berpihak kepada keadilan yang dijalankan oleh Orde Baru, karena politik yang dijalankan belum mengakomodasi pelestarian nilai-nilai toleransi berbasis multikultural.³

Melihat berbagai konflik diatas, dibutuhkan pemahaman yang mendasar mengenai kehidupan bersama dalam kultur yang berbeda, yang sering disebut dengan istilah multikultural.⁴ Multikulturalisme ini erat kaitannya dengan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Membangun kesadaran sebagaimana diatas tidaklah mudah, harus dengan usaha yang serius dan berkesinambungan. Perlu disadari bahwa lebih penting dari sikap inklusif tersebut adalah mengembangkan sikap multikulturalisme. Sikap ini ditunjukan setiap anggota masyarakat sekedar mengakui kita beragam atas perbedaan-perbedaan yang ada, tetapi

² M. Ainul Yaqin, *Guruan Multikultural. Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm.45.

³ MH. Nurul Huda, *Multikulturalisme Dalam Bayang-Bayang Histografi Resmi Nasional*, Sururin (ed.), (Bandung: Nuansa, 2005), hlm.165.

⁴ Parsudi Suparlan, "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 6, 2002, hlm.98. Lebih lanjut, baca Bhikhu Parekh. "National Culture and Multiculturalism" dalam Kenneth Thomson (ed.), *Media and Cultural Regulation*, (London: Sage Publications, 1997).

juga mendorong masing-masing umat untuk berkontribusi secara aktif terhadap proses-proses kehidupan bersama.

Disinilah multikulturalisme yang pada dasarnya merupakan pandangan dunia (*world view*) yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik. Meminjam istilah Bikhu Parekh, masyarakat multikultural merupakan suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan.⁵

Dalam aspek pendidikan, pemikiran multikulturalisme ini juga harus diturunkan dalam berbagai *term* penting yang menjadi penyokong kokohnya kebhinekaanyang ada di Indonesia, antara lain: jaminan kebebasan dalam beragama, jaminan adanya perlindungan akan hak-hak dasar kemanusiaan (*basic right*), budaya yang demokratis, dan perlindungan terhadap kalangan minoritas.⁶ Karena itu, sikap terbuka, toleransi, anti terhadap kekerasan merupakan nilai dasar yang harus dikembangkan sebagai ujung tombak dalam menjalani kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.⁷

Pemikiran multikulturalisme yang ada di Indonesia disandarkan – salah satunya pada Islam sebagai sumber pemikiran, sehingga dengan Islam sebagai pandangan dunia maupun pikiran – pikiran dasar, meletakkan kerangka dasar bagi pandangan dunia kemanusiaan yang mendasar. Dalam hal ini, multikulturalisme meletakkan hubungan individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan menyeimbangkan antara hak – hak individu dengan tanggung jawab sosial.⁸ Konsep multikulturalisme menjadi penting dalam realitas kebangsaan, karena

⁵ Bhikhu Parekh. "National Culture and Multiculturalism", *Ibid.*, hlm.7.

⁶ Franz Magnis-Suseno, "Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Konflik Antar Etnis dan Agama di Indonesia. Pencegahan dan pemecahan," dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, (Jakarta: INIS, 2003), hlm.120-123.

⁷ Franz Magnis-Suseno, "Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Konflik", *Ibid.*, hlm.120-123.

⁸ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm.11.

multikulturalisme menginginkan adanya bentuk keterbukaan dari masyarakat Islam di tengah kehidupan masyarakat yang plural. Karena itu, beragam persoalan kemanusiaan dengan berbagai macam ketidakadilan maka akan mendorong terjadinya perubahan struktur politik dan ekonomi.⁹

Dengan demikian, instrumen paling memungkinkan untuk membumikan pemikiran multikulturalisme untuk membangun kesadaran akan realitas kebangsaan salah satunya adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, guru menemukan media untuk mengenalkan keanekaragaman kultur yang ada di Indonesia secara lebih mendasar sebagai upaya untuk mencegah adanya konflik horizontal dan disintegrasi bangsa. Pendidikan agama Islam (PAI) yang diajarkan di madrasah maupun sekolah umum dirasakan belum berhasil seratus persen dalam menjadikan peserta didiknya bersikap toleran dan terbuka terhadap komunitas lain di luar dirinya. Banyaknya lulusan dari madrasah dan sekolah umum yang terlibat dalam konflik-konflik keagamaan menjadi bukti akan hal tersebut.¹⁰ Disinilah pentingnya studi mengenai peran guru dalam membangun kesadaran adanya keragaman dan kebhinekaan melalui pendidikan Islam multikulturalisme memiliki relevansi yang cukup signifikan dalam memotret realitas kebangsaan. Adanya sebuah harapan bahwa pendidikan agama Islam di madrasah dan sekolah umum mampu menjadikan peserta didiknya bersikap toleran dan terbuka. Diantara tujuan yang ingin dicapai adalah agar peserta didik memahami inti pendidikan Islam sekaligus mengembangkannya sikap multikultural berupa saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada.

Pembahasan

1. Tinjauan Multikulturalisme

Istilah multikultural banyak digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Secara etimologi, istilah multikulturalisme berasal dari akar kata : *multi* (banyak / beragam) dan *cultural* (budaya atau kebudayaan), yang berarti keberagaman budaya. Multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan

⁹Ibid, hlm.111.

¹⁰Arif Muzayin Shofwan, "Menggagas Pengembangan Pendidikan Agama Islam Multikultural Di Madrasah Dan Sekolah Umum," *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 12, no. 1 (2016): 19–30.

baik secara individual maupun secara kebudayaan¹¹. Budaya yang harus dipahami adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan budaya yang dipahami sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.

Multikulturalisme merupakan sebuah relasi pluralitas yang di dalamnya terdapat problem minoritas versus mayoritas, yang didalamnya ada perjuangan eksistensial bagi pengakuan, persamaan (*equality*), kesetaraan dan keadilan (*justice*). Multikulturalisme jelas memperkaya pluralisme, meskipun tidak bisa disamakan dengannya.¹²Dari sisi historisnya, konsep multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri khas masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan.¹³Pluralitas hanya merepresentasikan adanya kemajemukan, sedangkan multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme pada dasarnya melindungi dari berbagai bentuk diskriminasi dan prasangka, mereka bebas untuk mencoba mempertahankan apapun dari warisan atau identitas budaya yang mereka inginkan, serta menghargai dan toleransi dengan hak-hak orang lain¹⁴.

¹¹J. David dan Julia Jary, "Multiculturalism". *Dictionary of Sociology*, (New York: Harper, 1991), hlm.319.

¹² Bhikhu Parekh. "National Culture and Multiculturalism", *Ibid.*, hlm.5.

¹³ Parsudi Suparlan, "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti Dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 6, 2002, hlm.98.

¹⁴ Bhikhu Parekh. "National Culture and Multiculturalism", dalam Hanum, Farida, and Sisca Rahmadonna. "Implementasi Model Pembelajaran Multikultural di Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Artikel Multikultural-Stranas 2* (2009): 1-17.

Dalam pendidikan multikultural terdapat ruang untuk berdialog antar identitas etnis, agama, gender, bahasa, budaya, serta nilai. Individu dan masyarakat dibiasakan mempresentasikan nilai-nilainya, mengevaluasi tradisi mereka dalam wacana publik yang rasional, serta menafsirkan kembali identitas sesuai dengan konteks zaman. Dalam perspektif multikulturalisme, etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain.¹⁵ Apa yang diidamkan dan ditunggu oleh masyarakat kita berdasarkan atmosfir persahabatan yang murni dengan tidak mempermasalahkan identitas keagamaan, warna kulit, bahasa, suku dan bangsa.

2. Pendidikan Islam Multikultural

Keberadaan masyarakat multikultural tampaknya menghendaki sesuatu yang baru yang mendukung keberadaan masyarakat tersebut. Hal ini tampak dalam berbagai usaha yang diupayakan seperti asimilasi, *self-segregation*, integrasi, multikulturalisme dan belakangan muncul, misalnya di Indonesia ide tentang pendidikan multikultural. Masyarakat multikultural haruslah menerima perbedaan kultural yang ada di dalamnya, sekaligus menjamin terciptanya kesempatan yang sama bagi setiap warganya yang bermuara pada aspek ekonomi, sosial maupun politik.

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam ditinjau dari aspek apapun, baik agama, budaya, bahasa maupun etnik. Keragaman ini memiliki kerentanan terjadinya konflik yang cukup tinggi jika tidak dikelola dengan baik yang pada akhirnya akan menyebabkan disintegrasi. Satu dasawarsa terakhir saja sudah terjadi berbagai kerusakan sosial yang menimbulkan banyak kerugian dan pendiskriditan etnis tertentu. Dengan demikian, perlu adanya strategi untuk mengelola segala perbedaan tersebut di atas diberbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya, agama maupun pendidikan.

Dalam aspek pendidikan, maka pendidikan multikultural menawarkan suatu alternatif melalui suatu penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya pada peserta didik seperti keragaman etnis, budaya bahasa, agama, status sosial, gender dan ras. Tujuan

¹⁵ Lihat Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.93-94.

terpenting dari pendidikan multikultural ini adalah untuk meningkatkan kesadaran para peserta didik untuk berperilaku humanis, pluralis dan demokratis dalam menyikapi segala perbedaan yang ada di tengah masyarakat.

Pada dasarnya, dalam pendidikan multikultural ini guru dituntut tidak hanya menguasai ilmu dan profesional mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga juga harus mampu menanamkan nilai-nilai inti dari pendidikan multikultural seperti demokrasi, humanisme dan pluralisme. Dengan pendidikan seperti tersebut di atas diharapkan para peserta didik mampu menjadi generasi yang selalu menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, kepedulian dan humanistik dan kejujuran dalam berperilaku sehari-hari.

Pendidikan Islam multikultural adalah proses penanaman sejumlah nilai islami yang relevan agar peserta didik dapat hidup berdampingan secara damai dan harmonis dalam realitas kemajemukan dan berperilaku positif, sehingga dapat mengelola kemajemukan menjadi kekuatan untuk mencapai kemajuan, tanpa mengaburkan dan menghapuskan nilai-nilai agama, identitas diri dan budaya.¹⁶ Tentu saja definisi “pendidikan Islam” yang dipadukan istilah “multikultural” tersebut membawa konsekuensi tersendiri dalam pengembangan pendidikan di madrasah maupun sekolah umum. Capaian capaian nilai multikultural yang menghargai perbedaan akan menjadi prioritas utama dalam proses pendidikan.

Dalam konteks pendidikan agama Islam multikultural, maka istilah pendidikan multikultural justru untuk menegaskan bahwa Islam sarat dengan ajaran yang menghargai dimensi pluralis-multikultural. Apalagi pendidikan Islam sendiri telah sejak lama eksis dan memiliki karakteristik yang khas dalam realitas pendidikan di Indonesia. Penggunaan rangkaian istilah tersebut dimaksudkan untuk membangun sebuah paradigma sekaligus konstruksi teoritis dan aplikatif yang menghargai keragaman agama dan budaya. Konstruksi pendidikan semacam ini berorientasi pada proses penyadaran yang berwawasan multikultural.¹⁷ Dalam kerangka yang lebih jauh, konstruksi pendidikan Islam multikultural dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya

¹⁶Tim Kemenag, (2012). *Panduan Integrasi Nilai Multikultural dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Kirana Cakra Buana bekerjasama dengan Kementerian Agama RI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), TIFA Foundation dan Yayasan Rahima, hlm. 8.

¹⁷Abdullah, Jihan, (2014). “Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren (Studi Kasus pada Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor Poso)”, dalam *Istiqra, Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 2, No. 1, Januari- Juni 2014, hlm. 105.

secara komprehensif dan sistematis untuk mencegah dan menanggulangi konflik agama, radikalisme agama, separatisme dan integrasi bangsa.

3. Peran Guru PAI Dalam Mengimplementasikan Pendidikan Islam Multikultural

Pendidikan merupakan sarana untuk penjagaan nilai-nilai yang dirasakan mampu mendorong perkembangan dan keberlangsungan hidup di masyarakat. Dalam pendidikan multikultural diharapkan seorang guru dituntut profesional, akan tetapi juga harus mampu menanamkan nilai-nilai seperti demokrasi, humanisme dan pluralisme. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut diharapkan peserta didik akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip moralitas, kedisiplinan, kepedulian, humanistik dan kejujuran dalam perilaku keseharian. Berkaitan dengan implementasi pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran peserta didik untuk menyikapi keragaman yang ada di Indonesia, maka guru dapat melakukan beberapa hal.

a. Membangun Sikap Persamaan (*Equality*)

Dalam sejarah kehidupan manusia selama berabad-abad, persamaan dan perbedaan antar manusia selalu menjadi bahan kajian yang mungkin mendasari hampir semua teori tentang manusia dan seluk-beluk kehidupannya. Perbedaan yang lebih lanjut dapat ditemukan oleh seorang manusia saat ia berinteraksi dengan manusia lainnya. Menurut Bikhu Parekh bahwa banyak kajian yang berusaha memahami manusia dalam kaitannya dengan teori substantif persamaan, ini lebih banyak memperhitungkan kelompok marginal atau terpinggirkan.¹⁸ Persamaan mensyaratkan adanya pelibatan, kebebasan dan sama dalam kesempatan dengan latar belakang budaya yang berbeda. Derajat paling dasar adalah adanya penghormatan pada hak masing-masing individu. Guru dalam konteks ini harus mendorong kesadaran multikultural dengan membangun semangat empati, *equality* dan toleransi kepada peserta didik. Dengan menekankan bahwa setiap orang dengan latar belakang apapun memiliki persamaan dalam haknya sebagai warga negara. Tidak boleh satu kelompok mendominasi dan melanggar hak kelompok yang lainnya. Kelompok mayoritas tidak boleh menghegemoni kelompok minoritas. Disinilah penanaman nilai multikultural ini menjadi penting dalam pendidikan di Indonesia. Peserta didik hendaknya ditanamkan

¹⁸ Bhikhu Parekh. "National Culture and Multiculturalism", *Ibid.*, hlm.239.

semangat bekerjasama dalam kesedaerajatan, kesamaan dan tidak melakukan diskriminasi atas dasar ras, etnis, agama maupun gender.

Menurut Abdurrahman Wahid, kata kunci dalam kehidupan berbangsa adalah adanya persamaan perlakuan untuk mendapatkan pengakuan atau dihormati keberadaannya, persamaan mendapatkan kesempatan, dan perlakuan yang sama atas hukum, apapun budaya, ras, etnis, ras dan agama. Disinilah peserta didik bisa mengasah rasa sensitivitas terhadap kultur-kultur minoritas dan menggerakkan kelompok kultur yang mayoritas untuk agar mempunyai perasaan dan sikap yang sama dengan kelompok atau kultur lainnya.

b. Mendorong Demokrasi Substansial

Keragaman yang ada di Indonesia seringkali menumbuhkan konflik berkekerasan. Konflik yang seharusnya hanya antar perbedaan gagasan-pun telah merambah perbedaan gender, ras, agama, suku, status sosial dan ekonomi. Disinilah dunia pendidikan yang berwatak multikultural harusnya mampu mendorong peserta didik untuk memahami perbedaan sehingga konflik bisa dikelola dengan baik. Pendidikan harusnya mampu mendorong adanya etika untuk membangun konsensus dalam masyarakat. Kebutuhan akan konsesnsus ini bertujuan untuk menghormati perbedaan tanpa melanggar prinsip dari kesamaan, dan hak individu.

Guru dengan pendidikan multikulturalnya selalu mendorong untuk menegakkan demokrasi sebagai sarana membangun konsensus seluruh warga negara. Pendidikan multikultural menginginkan adanya demokrasi yang substansional, tidak hanya prosedural. Demokrasi yang sesungguhnya tidak hanya seremonial. Karena demokrasi yang demikian akan selalu mendorong adanya persamaan warga dalam hukum. Pendidikan multikultural harus mampu mendorong sikap yang inklusif, toleransi dan terbuka terhadap berbagai keragaman yang ada. Pendidikan harus mampu membangun sikap hidup yang multikultural bukan monokultural, cara hidup pambaruan bukan pembauran, pro-eksistensi bukan ko-eksistensi, bukan separasi tetapi interaksi. Guru melalui pendidikan multikultural merupakan sarana yang paling baik untuk proses pembudayaan. Peserta didik akan terlatih dan terbangun

kesadarannya untuk bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam kehidupan mereka.

c. Membangun *Gender Equality*

Gender merupakan suatu sifat yang diletakan pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya. Karena hal tersebut bersifat bentukan sosial maka gender tidak berlaku untuk selamanya, dapat berubah-ubah, serta berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan bukan merupakan kodrat dari Tuhan.¹⁹ Berbagai ketidakadilan gender terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Ketidakadilan tersebut secara umum meliputi beberapa hal, yaitu: marginalisasi, sub-ordinasi, *stereotype*, kekerasan (*violence*) dan beban kerja (*doubleburden*).²⁰

Akibat dari ketidakadilan tersebut terlihat saat ini kebanyakan perempuan sangat minim mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan berkiprah dalam kehidupan sosial jika dibandingkan dengan laki-laki. Begitu juga dalam bidang keagamaan.²¹ Guru dalam membangun kesetaraan gender melalui pendidikan multikulturalnya hendaknya mendasarkan pada prinsip *kulliyah al-khams*,²² yang merupakan tujuan utama syariat (*maqashidas-syariat*). Prinsip *al-kulliyah al-khams* memberi penekanan kesamaan dan kesetaraan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan serta hak-hak mereka yang vital. Perempuan juga memiliki potensi untuk bisa memainkan peran-peran yang selama ini diklaim hanya dan harus menjadi milik laki-laki. Banyak diantara kaum perempuan yang mampu tampil dalam peran kepemimpinan domestik dan publik, dalam bidang politik, ekonomi dan sosial.²³

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Persepektif Gender Dalam Al-Qur'an*, (Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999), hlm.40.

²⁰ Nasaruddin Umar, *Persepektif Gender Dalam Al-Qur'an*, *Ibid.*, hlm.44.

²¹ Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis. Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.398.

²² Konsep *Al-kulliyah al-khams* (lima prinsip pokok agama) yaitu: *hifz al-din* (perlindungan menganut kepercayaan dan agama), *hifz al-'aql* (perlindungan atas nalar), *hifz al-nafs* (perlindungan atas jiwa), *hifz al-'irdh* (perlindungan akan kehormatan), dan *hifz al-nasl wa al-mal* (perlindungan keberlangsungan keturunan dan harta benda)

²³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan. Refleksi Kyai Atas Wacana dan Gender*, (Jakarta: The Wahid Institute, 1994), hlm.21.

d. Berpegang pada prinsip pendidikan multikultural

Diantara beberapa prinsip yang harus difahami oleh guru adalah pembelajaran (kelas) dan kelembagaan (sekolah) dan di antara keduanya tidak bisa dipisahkan, tetapi justru harus ditangani lewat reformasi yang komprehensif; pendidikan multikultural menekankan reformasi pendidikan yang komprehensif dapat dicapai hanya lewat analisis kritis atas sistem kekuasaan dan *privileges* untuk dapat dilakukan reformasi komprehensif dalam pendidikan; maka tujuan pendidikan multikultural adalah untuk menyediakan bagi setiap siswa jaminan memperoleh kesempatan yang sama guna mencapai prestasi maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.²⁴

Guru dengan pendidikan multikultural seharusnya mendasarkan kepada al-Qur'an dalam membangun kesadaran dan menanamkan kesetaraan keada peserta didik, karena al-Qur'an banyak memuat konsep kesetaraan gender. *Pertama*, al-Qur'an mengakui martabat laki-laki dan perempuan dalam kesejajaran tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama disegala bidang kehidupan. Kesamaan tersebut dapat dilihat dari dimensi: *pertama*, hakikat kemanusiaannya. Islam memberikan kepada perempuan sejumlah hak-hak untuk meningkatkan kualitas kemanusiaannya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, dan hak-hak lainnya yang berkenaan dengan urusan publik. *Kedua*, dari segi ajaran agama. Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan akan mendapatkan balasan ketika melakukan kebaikan, dan begitu pula sebaliknya. *Ketiga*, dari segi hak-hak dalam keluarga, Islam yang memberikan hak untuk mendapatkan nafkah dan hak waris kepada perempuan.²⁵

Guru seharusnya menekankan pemahaman teks-teks keagamaan dengan pendekatan sosiologis-kontekstual, karena hal ini berkaitan dengan persoalan partikular. Seiring dengan perkembangan evolutif kesadaran mereka, bahwa eksistensi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan mengalami pergesaran yang cukup signifikan serta perubahan yang mendasar sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan hak - hak asasi dasar (*basic rights*) dan keadilan sebagai warga

²⁴ Al-Arifin, Ahmad Hidayatullah, (2012). "Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia", dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 75.

²⁵ Abdurrahman Wahid, "Refleksi Teologis Perkawinan Dalam Islam", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan. Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm.170.

negara secara personal. Semangat dari penafsiran teks-teks agama hendaknya mendasarkan pada prinsip ideal Islam seperti kesetaraan, keadilan, kemaslahatan dan kerahmatan, tanpa harus terbatas oleh sekat gender, jenis kelamin dan sistem sosial.²⁶

Pada titik ini, pemikiran multikultural dalam pendidikan menemukan titik temunya. Berkaitan dengan kesetaraan gender, pendidikan multikultural haruslah diarahkan untuk mencari keadilan gender. Hal ini tentunya berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban di kalangan umat Islam harus mendasarkan pada kerangka keseimbangan (*tawazun, balance*) dengan menggunakan berbagai pendekatan, seperti pendekatan kesejarahan dan sosiologis, pendekatan *maslahat* dan pendekatan ekonomi.

Selain itu, untuk lebih menampakkan ciri khas pendidikan Islam, maka pengembangan pendidikan Islam multikultural di madrasah maupun sekolah juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam kurikulum pendidikan Islam yang menurut al-Syaibany²⁷ antara lain: (1) Berorientasi pada Islam, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya. setiap yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan yang berdasarkan pada agama dan akhlak Islam; (2) Prinsip menyeluruh (*universal*) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum; (3) Prinsip keseimbangan yang relatif antara tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum; (4) Prinsip interaksi antara kebutuhan siswa dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat; (5) Prinsip pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual diantara peserta didik, baik perbedaan dari segi bakat, minat, kemampuan, kebutuhan dan sebagainya; (6) Prinsip perkembangan dan perubahan sesuai dengan tuntutan yang ada dengan tidak mengabaikan nilai-nilai *absolute*; (7) Prinsip pertautan (*integritas*) antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman dan aktifitas yang terkandung didalam kurikulum, begitu pula dengan pertautan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid juga kebutuhan masyarakat.

²⁶ Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis, Ibid.*, hlm.405.

²⁷ Al-Syaibany *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung. (Jakarta: Cet.I, Bulan Bintang, 1979), hlm. 485.

Dengan demikian pendidikan multikultural akan mampu membangun reaktualisasi dan pemahaman baru yang dibangun berdasarkan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan. Hal ini dilakukan dengan melihat kembali prinsip *kulliyah al-khams* serta *maqashid syar'i* sebagai landasan untuk menetralkan wacana keagamaan yang memiliki keberpihakan terhadap kaum perempuan serta menjauhkan dari bias gender. Guru dengan pendidikan multikultural diharapkan mampu membangun pemahaman yang humanis dan berwawasan gender, agar perempuan mempunyai peran dan kebebasan dalam berbagai sektor kehidupan.

e. Memberi penekanan pada muatan materi dan kurikulum pendidikan Islam

Pengembangan pendidikan Islam multikultural di madrasah dan sekolah juga dapat didasarkan pada kurikulum yang dikembangkan baik oleh Kemenag maupun Kemendiknas. kurikulum pendidikan Islam haruslah berdasar pada al-Qur'an dan Sunnah, serta keteladanan para tokoh muslim dalam sejarah Islam yang sukses dalam membawa kemajuan Islam dengan berbagai latar belakang perbedaan. ada beberapa materi dalam kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) yang hendak dikembangkan dan lebih ditekankan sebagaimana pemaparan Muliadi berikut:²⁸

Pertama, materi al-Qur'an, dalam menentukan ayat-ayat pilihan, selain ayat-ayat tentang keimanan juga perlu ditambah dengan ayat-ayat yang dapat memberikan pemahaman dan penanaman sikap ketika berinteraksi dengan orang yang berlainan agama, sehingga sedini mungkin sudah tertanam sikap toleran, inklusif pada peserta didik, yaitu: (1) Materi yang berhubungan dengan pengakuan al-Qur'an akan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebaikan (Q.S. al-Baqarah: 148); (2) Materi yang berhubungan dengan pengakuan koeksistensi damai dalam hubungan antar umat beragama (Q.S. al-Mumtahanah: 8-9); (3) Materi yang berhubungan dengan keadilan dan persamaan (Q.S. an-Nisa: 135). *Kedua*, materi fikih, dapat diperluas dengan kajian fikih siyasah (pemerintahan). Dari fikih siyasah inilah terkandung konsep-konsep kebangsaan yang telah dicontohkan pada zaman nabi, sahabat ataupun khalifah – khalifah sesudahnya. Pada zaman nabi misalnya, bagaimana Nabi Muhammad saw mengelola dan memimpin masyarakat Madinah yang multi etnis, multi kultur, dan

²⁸Muliadi, Erlan, (2012). "Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Multikultural di Sekolah", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, Jun 2012/1433, hlm. 55.

multi agama. Keadaan masyarakat Madinah pada masa itu tidak jauh beda dengan masyarakat Indonesia, yang juga multi-etnis, multi-kultur, dan multi-agama.

Ketiga, materi akhlak yang memfokuskan kajiannya pada perilaku baik-buruk terhadap Allah, Rasul, sesama manusia, diri sendiri, serta lingkungan, penting artinya bagi peletakan dasar-dasar kebangsaan. Sebab, kelanggengan suatu bangsa tergantung pada akhlak, bila suatu bangsa meremehkan akhlak, maka punahlah bangsa itu. Dalam al-Qur'an telah diceritakan tentang kehancuran kaum Nabi Luth, disebabkan runtuhnya sendi-sendi moral. Agar pendidikan agama bernuansa multikultural ini bisa efektif, peran guru agama Islam memang sangat menentukan. *Keempat*, materi Sejarah Kebudayaan Islam, yakni materi yang bersumber pada fakta dan realitas historis dapat dicontohkan praktik praktik interaksi sosial yang diterapkan Nabi Muhammad saw ketika membangun masyarakat Madinah. Dari sisi historis proses pembangunan Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad ditemukan fakta tentang pengakuan dan penghargaan atas nilai pluralisme dan toleransi. Tentu saja, terkait dengan materi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) bahwa agar pemahaman pluralism dan toleransi dapat tertanam dengan baik pada peserta didik di madrasah maupun sekolah umum, maka perlu ditambahkan uraian tentang proses pembangunan masyarakat Madinah dalam materi "Keadaan Masyarakat Madinah Sesudah Hijrah", dalam hal ini dapat ditelusuri dari Piagam Madinah. Sebagai salah satu produk sejarah umat Islam, Piagam Madinah merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad saw berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan, penegakan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Para ahli sejarah Islam biasanya mengaitkan pendidikan agama Islam multikultural dengan Piagam Madinah tersebut.

f. Keteladanan Guru

Peran seorang guru PAI dalam pengembangan pendidikan agama Islam multicultural di madrasah maupun sekolah umum sangat penting. Amin Maulani menyatakan bahwa peran guru dalam hal ini meliputi; *Pertama*, seorang guru harus mampu bersikap demokratis, baik dalam sikap maupun perkataannya tidak menunjukkan sikap yang diskriminatif; *Kedua*, seorang guru seharusnya mempunyai

kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama;

Ketiga, seorang guru seharusnya menjelaskan bahwa inti ajaran agama adalah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, dia bisa menjelaskan bahwa segala bentuk kekerasan seperti pengeboman, invasi militer, dan semacamnya merupakan sesuatu yang dilarang agama; *Keempat*, seorang guru seharusnya mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keragaman budaya, etnis, dan agama atau aliran.²⁹

Guru harus benar-benar menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya. Sebab suri tauladan seorang guru akan menjadi penentu keberhasilan terwujudnya pendidikan agama Islam multikultural di madrasah maupun sekolah umum tersebut. Susanti³⁰ menyatakan bahwa peran guru dalam pendidikan multikultural sangat penting dan signifikan. Seorang guru harus mengatur dan mengorganisasi isi, proses, situasi, dan kegiatan sekolah secara multikultural, di mana setiap peserta didik dari berbagai suku, ras, dan gender berkesempatan untuk mengembangkan dirinya dan saling menghargai perbedaan. Peran seorang guru harus responsif terhadap setiap ekspresi yang mengandung unsur diskriminasi. Dengan peran guru PAI yang demikian, maka pengembangan pendidikan agama Islam multikultural di madrasah maupun sekolah umum diharapkan akan bisa berjalan secara maksimal mulai dari proses hingga hasil yang ingin dicapai.

g. Guru selalu mengembangkan model dan metode mengajar yang variatif, tidak monoton

Dalam konteks pembelajaran dilakukan, secara historis filsafat pendidikan dibagi menjadi dua, 1). Guru sebagai pusat pembelajaran (*teacher-centered philosophies*) dan 2).

²⁹Maulani, Amin, (2012). "Transformasi Learning dalam Pendidikan Multikultural Keberagamaan" dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012, hlm. 41-42.

³⁰Susanti, Rini Dwi, (2012). "Menguak Multikulturalisme di Pesantren (Telaah atas Pengembangan Kurikulum)", dalam *Jurnal Ad-Din*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 318

Siswa sebagai pusat pembelajaran (*student-centered philosophies*). Terdapat empat model melaksanakan dalam pembelajaran, diantaranya: ³¹

1. *Self-study*; Model pertama ini memusatkan perhatian pada diri siswa. Agar siswa dapat memusatkan perhatian perlu diarahkan oleh dirinya sendiri dan bantuan dari luar, yaitu guru. Siswa harus dapat mengintegrasikan pengetahuan yang baru diterima kedalam pengetahuan yang telah dimilikinya. Untuk pelaksanaan model *self study* ini perlu didukung dengan peralatan teknologi, seperti komputer. Keberhasilan model ini ditentukan terutama oleh kesadaran dan tanggungjawab pada diri sendiri, misalnya dengan mengambil ibrah dari materi-materi sejarah kebudayaan Islam melalui video maupun audio visual yang telah disiapkan oleh guru.
2. Cara mengajar tradisional; Pada model ini kegiatan utama siswa adalah mendengar dan mencatat apa yang diceramahkan guru. Seberapa jauh siswa mendengar apa yang diceramahkan guru tergantung pada ritme guru membawakan ceramah itu sendiri. Siswa akan dapat mengintegrasikan apa yang didengar kedalam pengetahuan yang telah dimiliki apabila siswa dapat mengaitkan pengetahuan dengan apa yang diingat. Keberhasilan model ini banyak ditentukan oleh otoritas guru.
3. Model persaingan dalam pembelajaran, model ini menekankan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, semua siswa harus aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Seberapa jauh siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan akan ditentukan oleh seberapa jauh kegiatan memiliki kebebasan dan dapat membangkitkan semangat kompetisi. Pengetahuan yang diperoleh dan dapat dihayati merupakan hasil diskusi dengan temannya. Model ini memerlukan teknologi baik berupa alat maupun berupa kegiatan seperti konferensi dan seminar. Keberhasilan model ini terutama ditentukan oleh adanya saling hormat dan saling mempercayai di antara siswa.
4. Model *cooperative-collaborative*, model ini secara khusus menekankan kerjasama

³¹Jamil Suprihatiningrum. 2016. *Guru Profesional: Pedoman Kinerja dan Kompetensi Guru*. Yogyakarta: Ar RuzzMedia, hlm. 66-68.

diantara para siswa. Kegiatan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan bersama yang telah menjadi consensus diantara mereka. Konsensus ini didasarkan pada nilai – nilai yang dihayati bersama. Oleh karena itu, dalam kelompok senantiasa dikembangkan pengambilan keputusan. Kebersamaan dan kerjasama diantara para siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Kebersamaan dan kerjasama di antara para siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Disamping tujuan bersama yang akan dicapai, kebersamaan dan kerja sama dalam pembelajaran ini juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan kerja sama diantara para siswa. Dengan model ini, guru tidak selalu memberikan tugas-tugas individual, tetapi secara kelompok. Bahkan, penentuan hasil evaluasi akhir pun menggunakan prinsip kelompok. Artinya, hasil individu siswa tidak hanya didasarkan kemampuan masing-masing, tetapi juga dilihat berdasarkan hasil prestasi kelompok. Dengan demikian, siswa yang pandai akan menjadi tutor untuk membantu siswa yang kurang pandai demi prestasi kelompok sebagai satu kesatuan. Setiap siswa tidak hanya bertanggung jawab atas kemajuan dan keberhasilan dirinya, tetapi juga bertanggung jawab atas keberhasilan dirinya, tetapi juga bertanggung jawab atas keberhasilan dan kemajuan kelompoknya.

Beberapa model tersebut tidak ada yang lebih baik satu dari yang lain, karena model yang baik adalah model yang cocok dengan karakteristik materi, kondisi siswa, kondisi lingkungan, dan kondisi fasilitas.³² Disamping itu pula, diantara keempat model tersebut tidaklah bersifat saling meniadakan, artinya, sangat mungkin dalam proses pembelajaran memadukan berbagai model tersebut di atas. Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran seperti video maupun audio visual dapat menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran berbasis pendidikan multikultural.

Kesimpulan

Berbagai krisis multidimensi yang ada di Indonesia, diakui atau tidak merupakan bagian dari problem kultural yang salah satu penyebabnya adalah keragaman kultur yang ada di masyarakat kita. Keragaman kultur seharusnya bukan menjadi penyebab

³² Askhabul Kirom, "Peran Guru Dan Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural," *Al Murabbi* 3, no. 1 (2017): h. 75-80.

adanya diskriminasi, ketidakadilan, kecurigaan dan berbagai pelanggaran HAM, tetapi menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan. Berkaitan dengan implementasi pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran peserta didik untuk menyikapi keragaman yang ada di Indonesia, maka gurudapat melakukan beberapa hal, yaitu: 1) membangun sikap persamaan (*Equality*), Guru dalam konteks ini harus mendorong kesadaran multikultural dengan membangun semangat empati, *equality* dan toleransi kepada peserta didik. Dengan menekankan bahwa setiap orangdengan latar belakang apapun memiliki persamaan dalam haknya sebagai warga negara; 2) mendorong demokrasi substansial. Guru dengan pendidikan multikulturalnya selalu mendorong untuk menegakkan demokrasi sebagai sarana membangun konsensus seluruh warga negara; dan 3) membangun *Gender Equality*. Guru dalam membangun kesetaraan gender melalui pendidikan multikulturalnya hendaknya mendasarkan pada prinsip *kulliyah al-khams* yang merupakan tujuan utama syariat (*maqashidas-syariat*). 4)menerapkan prinsip pendidikan multicultural dan PAI, yakni kedua prinsip tersebut hendaknya dipadukan hingga menjadi satu kesatuan utuh yang dapat dimplementasikan di madrasah maupun sekolah umum; 5) penekanan nilai multicultural dalam pendidikan Islam, yakni nilai-nilai multicultural yang ada dalam mata pelajaran PAI misalnya; al- Qur'an, Fikih, Akhlak, dan SKI harus lebih dijelaskan dengan berbagai pendekatan dan metode sehingga mampu menjadikan peserta didik bersikap toleran, inklusif, dan semacamnya; 6)pentingnya peranguru yang mampu mempraktekkan dan memberi suri tauladan tentang nilai-nilai multikultural di madrasah maupun sekolah. 7). Guru perlu untuk memadukan model dan metode mengajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Jihan, (2014). "Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren (Studi Kasus pada Pondok Modern Ittihadul Ummah Gontor Poso)", dalam *Istiqra, Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 2, No. 1, Januari- Juni 2014.
- Abdurrahman Wahid, "Refleksi Teologis Perkawinan Dalam Islam", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar Harga Perempuan. Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

- Al-Arifin, Ahmad Hidayatullah, (2012). "Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia", dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- Al-Syaibany *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung. Jakarta: Cet.I, Bulan Bintang, 1979.
- Arif Muzayin Shofwan, "Menggagas Pengembangan Pendidikan Agama Islam Multikultural Di Madrasah Dan Sekolah Umum," *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 12, no. 1 (2016)
- Askhabul Kirom, "Peran Guru Dan Peserta Didik dalam Proses Pembelajaran Berbasis Multikultural," *Al Murabbi* 3, no. 1 (2017).
- Bhikhu Parekh. "National Culture and Multiculturalism".
- Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis. Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Franz Magnis-Suseno, "Faktor-Faktor yang Mendasari Terjadinya Konflik Antar Etnis dan Agama di Indonesia. Pencegahan dan pemecahan," dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*, Jakarta: INIS, 2003.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan. Refleksi Kyai Atas Wacana dan Gender*, Jakarta: The Wahid Institute, 1994.
- J. David dan Julia Jary, "Multiculturalism". *Dictionary of Sociology*, New York: Harper, 1991.
- Jamil Suprihatiningrum. 2016. *Guru Profesional: Pedoman Kinerja dan Kompetensi Guru*. Yogyakarta: Ar RuzzMedia.
- Konsep *Al-kulliyah al-khams* (lima prinsip pokok agama) yaitu: *hifz al-din* (perlindungan menganut kepercayaan dan agama), *hifz al-'aql* (perlindungan atas nalar), *hifz al-nafs* (perlindungan atas jiwa), *hifz al-'irdh* (perlindungan akan kehormatan), dan *hifz al-nasl wa al-mal* (perlindungan keberlangsungan keturunan dan harta benda)
- M. Ainul Yaqin, *Guruan Multikultural. Cross-Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Maulani, Amin, (2012). "Transformasi Learning dalam Pendidikan Multikultural Keberagamaan" dalam *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- MH. Nurul Huda, *Multikulturalisme Dalam Bayang-Bayang Histografi Resmi Nasional*, Sururin (ed.), Bandung: Nuansa, 2005.
- Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Muliadi, Erlan, (2012). "Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Multikultural di Sekolah", dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, Jun 2012/1433.
- Nasaruddin Umar, *Persepektif Gender Dalam Al-Qur'an*, (Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999.
- Parsudi Suparlan, "Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia". *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 6, 2002, hlm.98. Lebih lanjut, baca Bhikhu Parekh. "National Culture and Multiculturalism" dalam Kenneth Thomson (ed.), *Media and Cultural Regulation*, London: Sage Publications, 1997.

- Susanti, Rini Dwi, (2012). "Menguak Multikulturalisme di Pesantren (Telaah atas Pengembangan Kurikulum)", dalam *Jurnal Ad-Din*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2012.
- Tim Kemenag, (2012). *Panduan Integrasi Nilai Multikultural dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: PT. Kirana Cakra Buana bekerjasama dengan Kementrian Agama RI, Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), TIFA Foundation dan Yayasan Rahima.
- Yaqin, Ainul. *Pendidikan Multikultural: Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna. Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Zuhairini. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*. Surabaya: Usaha Nasional, 2000.